

OLIGARK SEBAGAI RENT SEEKER: HARUSKAH?

Vellayati Hajad
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
vellayati.hajad@gmail.com

Abstract

This article talks about the emergence of oligarchs in West Aceh district. Oligarch is referred to here are those who dominate limited resources. Furthermore, this paper aims to examine the practice of rent seeking that played by businessmen after the local election process. Based on the study it can be concluded that; First, there is a strong connection between businessmen and candidates; clientelistic both emerging businessman who work on the basis of patronage; and third the practice of rent seeking in the distribution of government projects.

Keyword: *oligarch, rent seeker, local election, democracy.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas tentang peran pengusaha terhadap dinamika politik lokal di Kabupaten Aceh Barat. Pengusaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku usaha yang bergerak di bidang konstruksi dan menggantungkan hidupnya pada proyek-proyek pembangunan dari pemerintah. Pengusaha jenis ini semakin marak ditemukan di Aceh setelah masa perdamaian antara NKRI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tidak terkecuali pengusaha di Kabupaten Aceh Barat.

Pengusaha adalah oligarch yaitu orang yang selalu berusaha mempertahankan kekayaan yang dimiliki dengan berbagai cara. Mereka akan menguasai dan mengendalikan berbagai sumberdaya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial yang dimilikinya (Winters, 2014). Meskipun demikian, oligark biasanya hanya segelintir orang atau elit saja dan para oligark ini akan bertindak secara politis hanya jika kekayaan yang dimiliki diganggu oleh pihak lain dan oligark berusaha mempertahankan dan meningkatkan kekayaan yang dimilikinya (Winters, 2011)

Pengusaha di Kabupaten Aceh Barat khususnya pengusaha di bidang konstruksi seringkali mendekati pemerintah yang berkuasa untuk mendapatkan “bagi-bagi proyek” yang kerap dilakukan. Pengusaha bertindak sebagai pemburu rente atau pemburu proyek pemerintah, baik itu proyek kecil atau pun besar. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk memenangkan tender yang telah dilelang oleh pemerintah. Namun untuk beberapa kasus, apabila pendekatan yang dilakukan tidak berbuah hasil maka mereka sendiri yang terjun dalam dunia politik dengan menjadi politisi (Sarangi, 2016). Masuknya para oligark dalam ranah politik dipandang Winters sebagai kegagalan negara dalam menjaga kekayaan mereka sehingga para pengusaha merasa terancam dan beralih posisi untuk terjun dalam pemerintahan. Secara sederhana dapat dikatakan pengusaha sebagai oligark adalah para individu pemilik kekayaan yang berupaya mempertahankan kekayaan yang mereka miliki (Carsodo, 1993; Morck, 2004).

Oligarki dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, dari sisi politik, oligarki merupakan pemusatan kekuasaan pada segelintir elit yang menjalankan urusan publik dengan mekanisme mereka. Kedua, dari sisi ekonomi-politik, oligarki merupakan relasi kekuasaan yang memusatkan sumber daya ekonomi pada segelintir pihak, dalam konteks ini relasi antara pengusaha dan elit politik yang saling menguntungkan secara timbal-balik. Dengan kata lain, oligarki didefinisikan sebagai politik mempertahankan kekayaan (wealth defense). Baik terlibat secara langsung dalam kekuasaan atau pun tidak. Dalam penelitian ini fokus pengamatan adalah terhadap oligark yang terlibat langsung dalam kekuasaan atau oligark yang terjun dalam politik terutama sebagai kepala daerah (Bartels, 2003).

Pengusaha terlibat aktif dalam pilkada Aceh Barat yang berlangsung bulan Februari 2017 lalu. Kehadiran pengusaha saat ini sangat berbeda dengan pengusaha pada masa Orde Baru yang hanya bertindak sebagai supporting system atau mendukung pemerintah yang sudah ada dalam berbagai bentuk kerjasama. Pengusaha yang muncul sebatas kapitalis semu (Kunio, 1990). Para pengusaha besar (kapitalis) di Indonesia tidak mampu berdiri sendiri dan bersaing dengan kompetitornya tanpa bantuan pemerintah. Kebanyakan dari mereka, kata Kunio, adalah para pemburu rente (*rent seekers*) yang mencoba mencari keuntungan melalui jalinan koneksi dengan pemerintah. Mereka mencari peluang menerima rente dengan memanfaatkan proteksi, lisensi bisnis, atau monopoli kegiatan bisnis tertentu dari pemerintah. Pengusaha-pengusaha jenis ini memperoleh dukungan dan perlindungan dari patronnya di dalam pemerintahan (Scott, 1972).

Meskipun demikian keterlibatan pengusaha atau oligark dalam politik praktis di Kabupaten Aceh Barat melalui pilkada bukan hanya sebatas sebagai calon bupati. Pengusaha justru memainkan peran vital sebagai pendukung calon bupati dalam pilkada. Di tengah biaya pilkada yang mahal, kehadiran pengusaha dalam politik sangat menarik untuk diteliti lebih jauh.

KAJIAN LITERATURE

Secara teoritis kegiatan mencari rente dianggap sebagai pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi atau menelikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan pihak pencari rente. Dengan bahasa sederhana, kegiatan mencari rente (*rent-seeking*) bisa didefinisikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah (Bhagwati, 1982; Krueger, 2000). Penggunaan kata *rente* merujuk pada sifat pelaku bisnis yang bertujuan untuk memudahkan memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal orang lain atau modal publik untuk keuntungan sendiri (*rent seeking behaviour*).

Mereka menggunakan kekuasaan pemerintah untuk menghambat penawaran atau permintaan sumberdaya yang dimiliki (Clark, 1998). Sedangkan Prasad mendefinisikan *rent seeking* sebagai proses di mana individu memperoleh pendapatan tanpa secara aktual meningkatkan produktivitas, atau malah mengurangi produktivitas tersebut (Prasad, 2003). Secara singkat dapat dikatakan bahwa semakin besar kuasa pemerintah untuk menentukan alokasi kesejahteraan (*allocation of wealth*) maka akan semakin besar kesempatan bagi munculnya pencari rente (Little, 2002).

Secara teoritis kegiatan mencari rente (*rent-seeking*) harus dimaknai secara netral, karena individu(kelompok) bisa memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi yang legal (*sah*) seperti menyewakan tanah, modal dan lain-lain. Meskipun demikian dalam literatur ekonomi politik, konsep *rent-seeking* tidak dimaknai secara netral. Kecenderungannya melihat perilaku pencari rente dari kacamata negatif. Asumsi awalnya adalah, setiap kelompok kepentingan (*self-interest*) selalu berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya (*effort*) sekecil-kecilnya. Pada saat ini seluruh sumberdaya ekonomi politik yang dimiliki akan dikerahkan, misalnya lobi untuk melancarkan tujuan tersebut. Persoalannya, jika produk lobi tersebut adalah terkait kebijakan maka akan berdampak sangat besar bagi masyarakat (Yustika, 2014).

Berbagai penelitian empiris di Korea Selatan, Filipina, dan Amerika mengurai hubungan mesra penguasa dan pengusaha dalam mengejar rente ekonomi untuk membangun kelompok *business-politic*. Para *chaebol* di Korea Selatan membangun perusahaan multinasional mereka dengan sokongan penuh dari rezim yang berkuasa saat itu (Kang, 2002). Mereka menjalin hubungan mesra (*cozy relationship*) dengan penguasa untuk memperoleh konsesi dan lisensi. Di Filipina, pengusaha menguasai ranah politik dan bisnis yang dibangun dengan dengan memusatkan perhatian kepada presiden sebagai patron pengusaha. Kemudian memunculkan apparatus negara yang terbuka untuk dijarah oleh kekuatan-kekuatan sektor privat yang kuat atau disebut *booty capitalism*.

Sedangkan Yoshihara Kunio menyebut kapitalis yang berkembang di Asia Tenggara ini sebagai kapitalis semu (*ersatz capitalist*), yaitu pengusaha yang tumbuh karena bergandeng mesra dengan rezim (Kunio, 1990). Pengusaha semu ini membangun bisnis dengan memperoleh kemudahan atau *privilege* dan proteksi politik. Sedang di Indonesia studi tentang oligark dilakukan oleh Robinson dan Hadiz yang mengkonfirmasi bahwa pengusaha adalah pemburu rente dari hasil selingkuh kepentingan dengan penguasa (Hadiz, 2014).

Istilah *rent-seeking behavior* dikembangkan dalam literatur ekonomi. Rente atau sewa ekonomi atas faktor produksi tertentu disebut sebagai kelebihan pembayaran atas biaya minimum yang diperlukan untuk tetap mengkonsumsi faktor produksi tersebut (Deliarnov, 2006). Contoh rente adalah laba yang diterima oleh sebuah perusahaan monopoli dalam jangka panjang. Laba ini tercipta karena adanya kekuatan monopoli atas faktor produksi tertentu sehingga menyebabkan tingginya pembayaran atas faktor produksi tersebut dari jumlah yang mungkin diterima seandainya faktor tersebut juga dimiliki oleh perusahaan lain. Sejak itu, segala bentuk keuntungan *eksesif* (*super normal*) yang berhubungan dengan struktur pasar monopolistis disebut rente.

Perusahaan yang bisa menciptakan halangan masuk pasar (*barrier to entry*) dengan cara menguasai sumber daya strategis atau mengupayakan agar tidak ada barang pengganti (*substitusi*), akan dapat menikmati laba super normal atau rente yang lebih tinggi. Untuk memperoleh rente yang lebih tinggi, kadang-kadang pengusaha berkolusi dengan penguasa agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pengusaha. Sebagai balasannya, pengusaha memberikan imbalan, baik berupai uang tunai maupun "hadiah". Dalam literatur ekonomi politik, imbalan yang diterima penguasa melalui kekuasaan yang dimilikinya dan digunakan untuk mengejar kepentingan pribadinya juga disebut rente. Sedangkan perilaku aparat pemerintah atau penguasa yang mengharapkan "imbalan" atas kebijakan yang dikeluarkannya disebut perilaku perburuan rente (*rent seeking behaviour*).

Mengenai "*rent seeking behaviour*", Gordon Tullock mendefinisikannya sebagai "*Collusive pursuit by producers of restriction on competition that transfer consumer surplus into producers surplus*" (Deliarnov, 2006). Dalam konteks Indonesia, perspektif *patrimonialism* dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena "*rent seeking behaviour*" yang terjadi di antara birokrasi pemerintah dan dunia bisnis di masa lalu. *Patrimonialism* merujuk pada sistem politik di mana para penguasa mencari dukungan yang dibangun berdasarkan pertukaran kepentingan materi, sebagai imbal jasa bagi penghormatan dan loyalitas bawahan kepada atasannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang berusaha memahami makna peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang tertentu dalam situasi tertentu secara holistik dalam realitas sosial empirik. Dengan menggunakan logika fenomenologi, penelitian ini berusaha untuk melihat keterlibatan pengusaha dalam pilkada Aceh Barat serta perilaku pengusaha setelahnya. Melihat aktor-aktor pengusaha tentunya tidak bisa secara parsial, namun harus dengan pendekatan holistik (Muhadjir, 1988).

Penelusuran informan penelitian dilakukan dengan cara *snowball sampling*, yaitu proses penelusuran informan yang berpijak pada logika efek bola salju. Artinya daftar nama informan diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan sebelumnya. Untuk memperkuat validitas data penelitian juga didukung dengan dokumentasi dan data sekunder melalui media massa lokal untuk mengimbangi temuan di lapangan.

Langkah-langkah dalam pencarian data untuk penelitian ini meliputi data lapangan dan data pustaka. Sumber data yang digunakan berupa manusia, peristiwa, tingkah laku, benda, arsip, dan dokumen. Strategi pengumpulan data dilakukan melalui dua cara. Pertama, melalui *field study* (*studi lapangan*), yaitu peneliti berinteraksi langsung dengan realita yang sedang diteliti sehingga akhirnya dapat diperoleh data primer, yaitu data yang berasal langsung dari informan. Data yang diperoleh berupa hasil pengamatan berperan serta (*observasi partisipatif*) maupun berupa hasil wawancara mendalam (*indepth interview*). Penggunaan teknik observasi partisipatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menjangkau informasi atau data mengenai konteks penelitian yang meliputi: manusianya; kondisi sosial budaya, politik, dan lingkungan; kegiatan program dan aktor yang terlibat.

Dalam hal ini, peneliti terlibat secara langsung dalam konsolidasi politik yang dilakukan oleh pengusaha dengan kandidat yang didukung. Adapun informan dari studi ini adalah para pengusaha di Kabupaten Aceh Barat. Pengusaha yang dimaksud adalah individu-individu yang berusaha dan berniaga di lingkungan Kabupaten Aceh Barat dan diutamakan pengusaha yang terlibat dalam kehidupan politik Aceh Barat.

Tahap selanjutnya adalah proses analisis yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data (*flow model of analysis*) atau model analisis interaktif. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti membuat catatan singkat dengan kata-kata kunci. Selanjutnya dari deskripsi singkat tersebut dikembangkan menjadi deskripsi lengkap, dilanjutkan dengan refleksi (metode,

teori, analisis). Deskripsi data dengan refleksinya tersebut disusun dalam fieldnote. Setelah unit data lengkap, dilanjutkan dengan tiga komponen analisis yaitu: (1) reduksi data, yang isinya rumusan singkat dari setiap jenis temuan fieldnote; (2) sajian data, yang berawal dari pokok-pokok temuan dalam reduksi data, penulisan mengenai kondisi sesuai dengan konteks yang diteliti; (3) penarikan kesimpulan, dilakukan berdasarkan uraian yang telah dibuat dalam sajian data. Dari hasil ini selanjutnya meneruskan dan melakukan pematapan dengan verifikasi. Artinya, guna meningkatkan validitas data yang diperoleh dan demi kemantapan kesimpulan dan tafsir makna penelitian, maka penelitian ini menggunakan pengolahan data yang bersifat triangulasi. Metode triangulasi dipakai guna memperoleh validitas data yakni menggunakan sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data yang sejenis atau sama serta digunakan untuk mengorganisir informasi yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

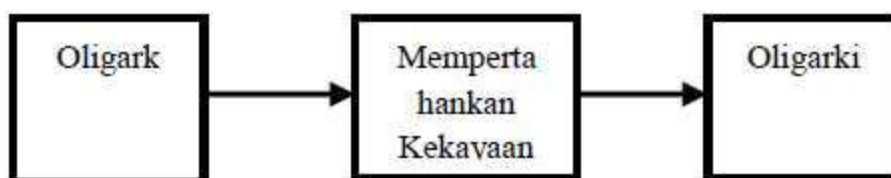
A. Memahami Konsep Oligarki Politik

Oligarki dipahami secara berbeda oleh para ahli dan hingga saat ini belum ada definisi baku yang dapat dijadikan pegangan. Hal tersebut karena perbedaan persepsi atas oligarki dan munculnya anggapan bahwa oligarki merupakan sebuah konsep seperti diungkapkan oleh James Payne maupun Leach. Oligarki menurut Aristoteles adalah sebuah bentuk pemerintahan. Oligarki sendiri memiliki sebutan yang berbeda di tiap negara diantaranya Grao Fino di Brazil, Rosca di Bolivia, dan Oligarquía di Peru dan mayoritas sumberdaya kekuasaan material yang dimiliki oleh oligark berasal dari kepemilikan atas tanah atau dengan bahasa lain mereka bertindak sebagai tuan tanah.

Posisi berbeda dikemukakan oleh Jeffrey Winters (2011). Oligarki politik menurut Winters adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh sejumlah kecil elit yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya secara finansial. Jeffrey Winters dalam bukunya yang berjudul Oligarki mengatakan bahwa motif dari oligarki politik adalah untuk mengejar kekayaan pribadi. Lebih lanjut Winters mengatakan bahwa orang yang melakukan oligarki atau disebut oligark adalah mereka yang menggunakan harta untuk mempertahankan kekayaannya. Sehingga secara sederhana oligarki dapat dikatakan sebagai politik untuk mempertahankan kekayaan oleh mereka yang kaya meskipun tidak selalu bertujuan politik. Oligarki politik dalam pandangan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Richard Robison dan Vedi Hadiz.

Dalam buku *Reorganizing Power In Indonesia: The Politics of Oligarchy in Age of Markets* (2004) Hadiz dan Robison mendefinisikan oligarki sebagai sistem yang dibangun oleh aliansi yang lebih cair di mana motif politik dan bisnis berbaur dan saling menunjang satu sama lain. Seorang oligark yang terjun dalam dunia politik dalam pandangan Hadiz dan Robison pasti bertujuan untuk menunjang kepentingan ekonomi dan di saat yang sama dapat pula menggunakan kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan politis. Pemahaman tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

Bagan 1: Proses Pertahanan Kekayaan Oligark



Sumber: Diadaptasi dari Jeffrey A. Winters

B. Oligark dalam Ruang Demokrasi

Demokrasi hari ini adalah hasil dari penumbangan masyarakat feodal di bawah kekuasaan kebangsawanan dan monarki absolut. Kelas borjuis (pengusaha) memainkan peran yang progresif, mereka berjuang untuk menghapuskan feodalisme dan mewujudkan lahirnya kebebasan, terutama kebebasan untuk mengakumulasi modal dan kekayaan yang mereka miliki (Moore, 1966). Sehingga dapat dikatakan pengusaha adalah bidan bagi kelahiran demokrasi. Logika ini menggiring banyak kalangan -termasuk pengusaha- percaya bahwa demokrasi akan tumbuh dan berkembang hanya jika kelas borjuis menjadi kuat dan aktif dalam proses demokratisasi, termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada). Banyak pengusaha berbondong-bondong terjun dalam dunia politik dan berusaha untuk menduduki jabatan publik (Sorensen, 2014).

Keterlibatan oligark dalam perebutan kekuasaan di tingkat lokal Aceh Barat sangat unik, karena pada dasarnya tidak semua pengusaha atau oligark mau untuk terjun langsung dalam perebutan kekuasaan (Hadiz, 2014). Jika akhirnya oligark terlibat dalam politik praktis maka itu artinya telah terjadi ancaman yang besar terhadap kekayaan yang mereka miliki. Karena semakin besar ancaman maka oligark akan semakin terlibat secara aktif dalam politik yaitu dengan ikut dalam pertarungan pemilihan kepala daerah seperti yang berlangsung di Aceh Barat (Mietzer, 2002).

Tingginya keterlibatan oligark dalam ranah politik lokal Aceh politik praktis pada beberapa daerah seperti kabupaten Aceh Barat melalui pilkada sangat dimungkinkan karena besarnya kekuasaan material atau kekayaan yang dimiliki oleh sang calon yang berasal dari kalangan pengusaha atau oligark. Faktor kekayaan sebagai modal untuk ikut bertarung dalam pilkada sangat penting. Tingginya biaya politik dalam Pilkada menjadikan kemunculan oligark sebagai sebuah keniscayaan. Richard Robison dalam bukunya *The Rise of Capital* (2009) melihat aspek ekonomi-politik sebagai jantung kajian tentang politik dan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, Robison berusaha melihat hubungan antara bisnis dan negara yang sangat penting dalam dinamika politik saat ini yang mengharuskan adanya pemilihan secara langsung yang otomatis menjadikan biaya politik semakin membengkak sehingga hanya kalangan "berduit" atau yang memiliki kekayaan saja yang akan mampu bersaing dan bertarung dalam sebuah pemilihan umum atau pilihan terakhir adalah didukung dan dibiayai oleh kalangan berduit dengan konsekuensi memberikan loyalitas kepada mereka ketika sudah terpilih sebagai bupati nantinya (Robison, 2009).

Pengusaha dalam pandangan Winters adalah oligark yang menekankan pada kekuatan sumber daya material sebagai basis dan upaya pertahanan kekayaan pada diri mereka. Adanya ketidaksetaraan material tersebut kemudian menghasilkan adanya ketidaksetaraan kekuasaan politik. Istilah oligark sendiri berasal dari oligarki yang berarti pemerintahan oleh yang sedikit (berasal dari bahasa Yunani). Setelah reformasi ternyata peluang untuk mendekati inti kekuasaan semakin terbuka lebar. Pengusaha membutuhkan proteksi dan peluang bisnis dan pejabat terpilih membuka pintu untuk itu. Banyak cara yang digunakan untuk mendekati pusat kekuasaan salah satunya dengan mengorbitkan kandidat kepala daerah yang baru yaitu dengan membiayai proses kampanye seorang kandidat dalam pilkada dan mengharapkan balasan kemudahan transaksi bisnis setelah kandidat tersebut terpilih (Winters, 2011).

Seperti yang terjadi di pilkada Aceh Barat, setiap pengusaha terlibat aktif mendukung salah satu dari tiga kandidat yang maju dalam pemilihan bupati Aceh Barat. Pengusaha memberikan dukungan finansial dan non-finansial kepada kandidat yang didukung. Dukungan finansial berupa dana kampanye dalam pilkada sedangkan dukungan non-finansial berupa bantuan pemberian fasilitas untuk menggunakan mobil dan rumah sebagai posko kemenangan. Pengusaha yang bergantung pada proyek dari pemerintah melihat pilkada sebagai pintu menuju kesuksesan ekonomi.

Para pengusaha muncul bukan sebagai masyarakat biasa, mereka hadir dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk dalam politik. Dewasa ini kebanyakan anggota dan pimpinan partai berasal dari kalangan pengusaha. Relasi ini menghasilkan suatu sistem yang saling menguntungkan, partai tumbuh dan berkembang berkat dukungan kelas pengusaha. Sehingga bukan hal yang aneh ketika partai politik saat ini berubah menjadi ladang bisnis. Setiap kandidat yang mencalonkan diri akan melalui partai politik akan dimintai ‘uang perahu’ atau ‘mahar’. Secara sederhana dapat dikatakan terjadi hubungan yang saling menguntungkan disini. Pengusaha memerlukan partai politik sebagai sarana bisnis untuk kepentingannya dan bagi pengurus partai politik, pengusaha dipandang dapat mendorong kemandirian partai. Sehingga partai politik tidak perlu melirik anggaran publik atau menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya di parlemen atau birokrasi untuk mengeruk keuntungan demi kas partai politik.

Sehingga tidak heran pada saat perekrutan kandidat, sistem yang berjalan adalah mekanisme demokrasi yang semu (pseudo democracy) dan tidak transparan (Volpi, 2004). Hal ini disebabkan mekanisme itu terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan pragmatik elit partai politik. Maka jangan bertanya soal kualitas kandidat yang diusung, yang terjadi adalah kualifikasi kandidat baik itu kompetensi, kredibilitas, dan akuntabilitas calon akan tenggelam oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek elit partai politik. Di sinilah terjadi negosiasi menyangkut kontribusi calon terhadap partai. Akibatnya calon yang dimunculkan adalah yang berhasil memenangkan negosiasi itu, dengan tolok ukur utamanya berupa materi atau kekayaan.

Fenomena di atas dapat menjadi ilustrasi bagaimana karakteristik bisnis yang murni pencari laba bertemu dengan kepentingan kekuasaan. Besarnya komposisi sumbangan pengusaha dapat dipandang sebagai besarnya kepentingan bisnis dalam mempengaruhi kebijakan parpol. Transaksi ini terjadi biasa pada saat proses untuk mencapai kekuasaan lewat pemilu dan berlanjut ketika kekuasaan didapat dan diimplementasikan. Hal ini berdampak pada otoritas penguasa partai politik dalam mengimplementasikan kebijakan dapat mudah dipengaruhi kepentingan pengusaha sebagai pamrih dukungan saat pemilu. Disinilah kemudian terjadi distorsi yang seharusnya posisi bisnis sebenarnya berada di luar lingkup kekuasaan namun ternyata dapat membalikan kenyataan. Akibatnya, peran kekuasaan berubah yang seharusnya berwatak pelayanan menjadi berorientasi keuntungan. Hal ini menjadi pertanda lonceng kematian demokrasi. Hal itu terkait dengan terjadinya komplikasi karena menyatunya tiga karakter sumber daya politik yakni pada diri pengusaha, bisnis, dan partai politik. Bila hal ini terjadi maka partai politik akan berkarakter oligarkis yang memusatkan kekuasaan pada kekuatan pengusaha. Pusat kekuasaan tumbuh di sekitar sedikit elite utama di pucuk organisasi partai. Kepentingan dan kenikmatan partai pun tidak terdistribusikan ke luar lingkaran elite utama itu.

C. Kemunculan Pengusaha di Pilkada Aceh Barat

Kemunculan pengusaha di Aceh Barat dalam pilkada tidak terlepas dari konsep kemunculan oligarki dan bangkitnya kapitalisme global. Dalam pilkada Aceh Barat muncul nama tiga calon yaitu H.T Alaidinsyah, H. Ramli, MS, dan Fuad Hadi, SH.,MH. Ketiganya memiliki latar belakang profesi yang berbeda, namun ketiganya didukung oleh kalangan pengusaha untuk memenangkan pemilihan bupati Aceh Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 1 Nama dan Profesi Calon Bupati Aceh Barat

No.	Nama Calon Bupati	Profesi
1.	H.T Alaidinsyah	Pengusaha
2.	H. Ramli, MS	Politisi
3.	Fuad Hadi, SH.,MH	Akademisi

Sumber : KIP Aceh Barat

Dari tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa ketiga calon bupati memiliki latar belakang profesi yang berbeda. H.T Alaidinsyah berprofesi sebagai pengusaha di bidang konstruksi dan alat berat. Hampir semua proyek pembuatan jalan dan jembatan di wilayah barat dan selatan Aceh dikerjakan oleh perusahaan konstruksi PT. Wiratako Mitra Mulia milik H.T Alaidinsyah atau Haji Tito. Selain itu, Haji Tito juga merupakan bupati terpilih di periode sebelumnya dan kembali mencalonkan diri dalam pilkada 2017 sebagai petahana/incumbent dan diusung oleh 8 partai politik antara lain Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PDIP, PKS, PPP, Partai Nasdem, dan PKB dan dua partai pendukung yaitu PKPI dan Perindo.

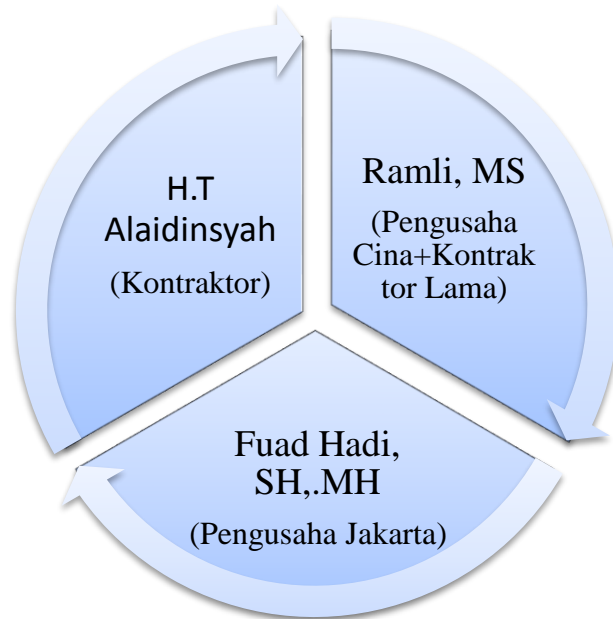
H. Ramli, MS adalah seorang politisi yang menduduki jabatan sebagai wakil ketua DPRK Aceh Barat melalui Partai Aceh. Sebelumnya H. Ramli, MS adalah bupati Aceh Barat periode 2007-2012 dan kemudian mencalonkan diri kembali pada pilkada 2012 namun kalah suara dari H.T Alaidinsyah. Pada pilkada 2017 H. Ramli, MS kembali mencalonkan diri menjadi bupati melalui Partai Aceh (PA). Karir H. Ramli, MS sebelum menjadi politisi adalah seorang guru PNS dan kemudian bergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ketika konflik berlangsung di Aceh. Oleh karena itu bukan hal yang aneh ketika mencalonkan diri menjadi bupati Aceh Barat H. Ramli, MS didukung oleh Partai Aceh (PA).

Fuad Hadi, SH.,MH adalah seorang dosen di Universitas Teuku Umar dan juga seorang advokat lulusan Universitas Indonesia, Jakarta dan memiliki kedekatannya dengan tokoh-tokoh nasional terutama tokoh dari HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Fuad Hadi, SH.,MH maju sebagai calon bupati melalui jalur independen dengan mengumpulkan KTP milik masyarakat Aceh Barat. Setidaknya terkumpul 7480 lembar KTP dukungan untuk Fuad Hadi, SH.,MH mencalonkan diri dalam pilkada 2017. Fuad Hadi dianggap mewakili kalangan muda untuk memimpin Aceh Barat untuk menggantikan kalangan tua yang sudah memimpin Aceh Barat di periode sebelumnya.

Berbicara mengenai dukungan dari kalangan pengusaha terhadap ketiga pasang calon adalah hal yang menarik. Meskipun tidak semua pengusaha menunjukkan diri atau memberikan dukungan secara terang-terangan, namun faktor kedekatan personal calon bupati dengan kelompok atau pihak pengusaha tertentu dapat memberikan sedikit gambaran kepada kita terkait konfigurasi dukungan yang terjadi ketika pilkada. Sebagai ilustrasi, H.T Alaidinsyah yang memiliki latar belakang profesi sebagai pengusaha konstruksi memiliki hubungan yang baik dengan para kontraktor. Hal tersebut dapat dilihat dari melimpahnya alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho, dan poster yang disediakan dan dipasang oleh pendukung H.T Alaidinsyah secara mandiri. Sedangkan H. Ramli, MS memiliki kedekatan dengan pengusaha keturunan Cina dan kontraktor pemenang tender ketika H. Ramli, MS menjadi bupati yang kini tidak memperoleh peluang bisnis ketika masa pemerintahan H.T Alaidinsyah. Lama berkiprah di Jakarta menjadikan kandidat ketiga yaitu Fuad Hadi, SH.,MH memiliki kedekatan dengan banyak tokoh nasional, tidak terkecuali dari kalangan pengusaha. Salah satunya adalah adik Prabowo Subianto, yaitu Hasyim Djojohadikusumo. Fuad Hadi, SH.,MH tercatat pernah bekerja di PT Potensi Bumi Sakti (PBS) yang bergerak di bidang perkebunan karet dan menjabat sebagai Humas Perusahaan.

Relasi calon bupati ke pengusaha adalah sebuah keniscayaan. Apabila melihat dari sisi positif keterlibatan pengusaha adalah hal yang baik karena sudah sukses dan kaya raya tidak akan terlalu rakus mengejar harta dan terdorong melakukan perilaku koruptif. Tetapi dari sisi negatif kita tentu khawatir bahwa uang yang habis sebagai modal kampanye pastilah harus dikembalikan. Dari mana kalau tidak dari hasil korupsi atau kolusi. Karena politik memerlukan uang sebagai kekuatan sekaligus pelicin jalannya organisasi partai politik dengan segala aktivitasnya. Boleh dikatakan semua serba uang atau pasti harus ada uang agar kegiatan bisa berjalan. Dengan kata lain biaya politik itu besar. Dengan menggunakan pendekatan pengusaha dalam melihat perilaku pengusaha dalam politik ketika pilkada Aceh Barat, maka dapat dibentuk pola sederhana sebagai berikut.

Diagram 1 Hubungan Calon Bupati-Pengusaha



Perolehan suara calon bupati dan wakil bupati pada pilkada Aceh Barat 2017 dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2 Perolehan Suara Calon Bupati Aceh Barat

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H.T. Alaidinsyah dan H. Kamarudin, SE	48.201 (45,93%)
2.	H. Ramli. MS dan H. Banta Puteh Syam	52.538 (50,06%)
3.	Fuad Hadi, SH., MH dan Drh. M. Arif	4.215 (4,01%)

Sumber : KIP Aceh Barat

Apabila melihat dari sisi pengusaha sebagai kelompok oligark setidaknya ada empat kecenderungan oligarki ini dalam konteks pemusatan kekuasaan kepada pengusaha, pertama, oligarki dari segi organisasi, partai politik untuk mewedahi kepentingan dan mencapai tujuan bersama, tetapi para aktor yang membentuk dan menjadi anggota partai mau tidak mau harus meninggalkan atribut kepartaian apabila kepentingan organisasi sudah mengemuka. Misalnya keinginan partai berbisnis dengan alasan agar partai politik berbisnis oleh mereka yang menganjurkan dipandang dapat mendorong kemandirian partai. Jika dibiarkan berbisnis, partai politik tidak perlu melirik anggaran publik atau menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya di parlemen atau birokrasi untuk mengeruk keuntungan demi kas partai.

Kedua, oligarki dalam kepemimpinan partai. Partai selalu membutuhkan pemimpin, partai-partai berkompetisi untuk menempatkan kadernya sebagai pemimpin. Hasrat inilah yang menjadi penyebab utama berlakunya hukum besi oligarki (Michels, 1984). Pemimpin partai selalu mengendalikan keputusan partai maupun anggotanya, termasuk mengendalikan atau menyeleksi kandidat yang akan dipromosikan. Dalam kaitannya dengan keinginan partai politik berbisnis peluang masuknya pengusaha, hampir bisa dipastikan ia akan menggegam kekuasaan yang luar biasa di dalam partai sekaligus dengan kemampuan modalnya yang besar.

Ketiga, oligarki dalam konteks hubungan partai dengan massa. Partai tidak pernah menempatkan warga negara sebagai entitas yang beradab dan mempunyai hak-hak politis yang dijunjung tinggi. Seperti halnya kaum kapitalis yang menempatkan warga masyarakat sebagai konsumen demi keuntungan mereka. Bagi para politisi partai yang berasal dari pengusaha hal

ini menjadi ladang empuk untuk memanipulasi massa dengan politik uang demi kepentingan mereka yaitu meraih kekuasaan lewat pembelian suara.

Keempat, oligarki dalam kekuasaan. Pemilihan umum adalah “pesta” yang untuk sementara melibatkan massa-rakyat. Namun setelah pesta bersama rakyat usai, para politisi yang telah meraih kekuasaan menggelar pesta kekuasaan dan kekayaan secara oligarkis, tidak lagi bersama rakyat. Sejalan dengan perilaku pengusaha sebaia pemburu rente dalam kekuasaan, para pengusaha yang telah berkusa ini melupakan janji-janji yang telah mereka obral pada rakyat menjelang pemilihan umum. Mereka tidak lagi berfikir tentang rakyat, tetapi berpikir bagaimana kekuasaan, kursi jabatan, proyek, dan fasilitas negara diperoleh. Dan ketika jabatan hampir berakhir mereka akan berjuang memperoleh pesangon. Mereka tidak lagi dekat dengan massa yang menjadikan mereka punya kekuasaan.

SIMPULAN

Tulisan ini berbicara tentang kemunculan oligark di Kabupaten Aceh Barat. Oligark yang dimaksud di sini adalah pengusaha yang menguasai sumber daya yang terbatas. Oligark yang mencoba menjalin hubungan dengan birokrasi dalam rangka untuk memperoleh keuntungan bisnis dapat disebut sebagai pemburu rente (*rent-seeker*). Pada dasarnya pemburu rente adalah mencari dan mendapatkan peluang untuk menjadi penerima rente yang diberikan oleh birokrasi dengan cara menyerahkan sumberdayanya, menawarkan proteksi atau memberikan wewenang tertentu yang diaturnya. Koneksi kuat antara pengusaha dan calon bupati memberikan keleluasaan kepada pengusaha atau oligark untuk bermain dan mencari kesempatan rente setelah proses pemilihan bupati. Pengusaha mengharapkan selisih antara nilai pasar dari suatu “kebaikan hati” dari birokrasi atau pemerintah daerah dengan jumlah yang dibayar oleh pengusaha kepada bupati ketika masa pemilihan.

Sehingga pada akhirnya, pelaku bisnis yang lain tidak bisa masuk pasar karena lisensi khusus yang dimiliki oleh pengusaha. Kekuasaan dipakai untuk memengaruhi pasar sehingga mengalami distorsi untuk kepentingannya. Dalam praktiknya perburuan rente ekonomi, pelaku usaha mengundang kekuasaan atau memengaruhi kekuasaan untuk mengambil dari suatu nilai yang tidak dikompensasi, baik itu berupa kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan bupati yang menguntungkan pengusaha pendukung. Termasuk membentuk hubungan patron-klien dengan penguasa. Hubungan balas jasa ini terus berlanjut hingga periode kepemimpinan bupati berakhir dan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.

Kandidat-kandidat yang memenangkan pilkada melalui politik uang dan hubungan balas jasa ini bisa dipastikan akan bekerja hanya semata-mata untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan, adanya loyalitas penguasa kepada penyumbang dana dengan pembagian rente pembagian proyek-proyek pemerintah adalah hal yang marak terjadi setelah pilkada, kurangnya perhatian pemerintah terhadap kepentingan rakyat banyak. Tradisi demokrasi dan pembaharuan tatanan pemerintahan akan terabaikan, semangat yang tumbuh hanya terfokus pada bagaimana mengakumulasi keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari posisi yang telah diraih.

Fenomena ini menunjukka bahwa kemajuan demokrasi berada pada titik balik kemunduran. Pada sisi lain kita melihat, bisa jadi masuknya pengusaha dalam kancah politik dan pemerintahan karena macetnya proses kaderisasi di lingkungan partai politik maupun pemerintahan. Tetapi kemungkinan yang lebih besar adalah karena faktor kedekatan antara politik, kekuasaan, dengan uang. Untuk berkarier di politik dan memenangi pemilihan ketua umum sebuah partai politik, berapa banyak dana yang harus disiapkan. Meskipun demikian, demokrasi membutuhkan elite partai politik, dari kalangan manapun. Terutama kalangan yang tidak sekadar memanfaatkan momentum pemilu untuk meraih kekuasaan dan kepentingan sesaat, juga melainkan mengakomodasi aspirasi rakyat, dan menjalankan kekuasaan demi kepentingan rakyat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada pemberi beasiswa BUDI DN-LPDP yang telah mendanai penelitian ini dan pihak terkait yang telah membantu berjalannya proses penelitian dan terima kasih untuk pengelola Jurnal Public Policy (JPP).

REFERENSI

- Bartels, L. and B. 2003. Economic Behavior in Political Context. *American Economic Review*, 2, 156–610.
- Bhagwati, J. N. 1982. The welfare consequences of directly-unproductive profit-seeking (DUP) lobbying activities: Price versus quantity distortions. *Journal of International Economics*, 13(1–2), 33–44.
- Carsodo, F. H. 1993. *Pengusaha dan Proses Transisi : Kasus Brazil*. *Transisi Menuju Demokrasi : Tinjauan Berbagai Perspektif*. (P. C. S. & L. O'Donnell, Ed.). Jakarta: LP3ES.
- Clark, D. J. and C. R. 1998. Competition over More than One Prize. *American Economic Association*, 88(1), 276–289.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Hadiz, V. R. and R. 2014. Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia. *Prisma*, 33(1), 35–56.
- Kang, D. C. 2002. *Crony Capitalism: Corruption and the Development in South Korea and Philipines*. UK: Camridge University Press.
- Krueger, A. 2000. Government Failure in Development. In Frieden (Ed.), *Modern Political Economy an Latin Amerika: Theory and Policy*. USA: Westview Press.
- Kunio, Y. 1990. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Little, I. M. 2002. *Ethics, Economics and Politics: Principles of Public Policy*. New York: Oxford University Press.
- Michels, R. 1984. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*. Jakarta: CV Rajawali.
- Mietzer, M. 2002. Indonesia's direct elections: Empowering the electorate or entrenching the New Order oligarchy. In *Soeharto's New Order and its Legacy*. ANU Press.
- Moore, B. 1966. *Social Origin of Dictatorship and Democracy*. Buston: Beacon Press.
- Morck, R. and Y. 2004. Family Control and the Rent-Seeking Society. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 28(4), 391–409.
- Muhadjir, N. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Prasad, B. C. 2003. Institutional Economics and Economic Development: The Theory of Property Rights, Economic Development, Good Governance and the Environment. *International Journal of Social Economics*, 30(6), 741–762.
- Robison, R. 2009. *Indonesia: The Rise of Capital*. Singapore: Equinox Publishing.
- Sarangi, P. 2016. Politics as Business: An Analysis of the Political Parties in Contemporary India. *Studies in Indian Politics*, 4(1), 37–48.
- Scott, J. C. 1972. Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *American Political Science Association*, 66(1), 91–113.
- Sorensen, G. 2014. *Demokrasi dan Demokratisasi*. (T. N. Effendi, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Volpi, F. 2004. Pseudo- democracy in the Muslim world. *Third World Quarterly*, 25(6), 1061–1078.
- Winters. 2011. *Oligarki*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Winters. 2014. Oligarki dan Demokrasi di Indonesia. *Prisma*, 33(1), 11–34.
- Yustika, A. E. 2014. *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.